

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA SUNGAI
PENUH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(STUDI KASUS PADA JALAN CANGKING)**

ADEL YOLANDA, FADLAN KALMA, PEBI JULIANTO
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email :

Adelyolanda132@gmail.com

Fadkalma@gmail.com

pebijulianto@gmail.com

ABSTRACT

This research took place at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) office of Sungai penuh City. The purpose of this study is to find out how Planning regional autonomy is in the implementation of infrastructure development in the City of Sungai penuh (a case study on the Cangking road). The approach taken in this research is qualitative. The number of informants amounted to 7 people. Data collection techniques and tools in this study were interviews, observation, and documentation studies. The unit of analysis is the Institution, the Institution in this study is the Regional Development Planning Agency for the City of Sungaipuh. The results of the study showed that the Cangking road infrastructure development in Sungai penuh City had been carried out by the local government, however, the regional government of Sungai penuh City had not been efficient enough in carrying out the Cangking road infrastructure development in SungaiFull City, because there were still several Cangking roads in the SungaiFull city area. damaged and degraded. The weak factor in infrastructure development in the city of Sungai penuh is the human resource factor and the financial factor (funding) because the budget in the city of Sungai penuh is not enough so it is being transferred to DAK funds. The Planning regional government of Sungai penuh City must be able to control the results of natural wealth so that regional revenue or income increases.

Keywords : Planning, Development, Infrastructure

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sungai Penuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana otonomi daerah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Sungai Penuh (Studi kasus pada jalan Cangking). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun jumlah informan berjumlah 7 orang. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Unit analisis adalah Lembaga, Lembaga dalam penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian menunjukkan Pembangunan Infrastruktur jalan Cangking di Kota Sungai Penuh sudah terlaksanakan oleh pemerintahan daerah namun, pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh belum cukup efisien dalam menjalankan

Pembangunan Infrastruktur jalan Cangking di Kota Sungai Penuh, Karna ada di beberapa jalan Cangking di daerah kota Sungai Penuh masih ada yang rusak dan mengalami Penurunan. Faktor lemah nya Pembangunan Infrastruktur di kota Sungai Penuh yaitu factor sumber daya Manusia dan faktor Keuangan (pendanaan) karna Anggaran di Kota Sungai Penuh belum cukup sehingga di alihkan ke dana DAK. Pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh harus bias mengendalikan hasil kekayaan alam agar penerimaan atau pemasukan daerah lebih meningkat.

Kata kunci: **Perencanaan,Pembangunan,Infrastruktur**

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan menggunakan Perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam Perencanaan pembangunan adalah keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian kapan melakukannya, selanjutnya bagaimana melakukannya dan yang terakhir siapa yang melakukannya. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik juga akan menghasilkan keputusan atau hasil yang baik juga.

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di setiap daerah, maka daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri hal ini telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik Andirfa (2009) dalam Jaya dan Dwirandra (2014).

Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatkan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah.

PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah ang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dengan meningkatnya PAD diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor pembangunan yang paling dibutuhkan di Kota Sungai Penuh karena ada banyak ketergantungan pengembangan ekonomi, sosial dan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur jalan itu sendiri.

Penyediaan infrastruktur jalan yang merata di seluruh wilayah Kota Sungai Penuh merupakan hal mutlak untuk mewujudkan kota yang mandiri, dengan pengelolaan pembangunan fisik kota yang meliputi sistem transportasi yang memiliki interkoneksi antar wilayah.

Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang(PUPR) terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur jalan, khususnya jalan Cangking. Seiring bertambahnya penduduk dan pertumbuhan wilayah, serta untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman, namun sampai saat ini penanganan pembangunan jalan Cangking ini belum dapat dilakukan secara optimal dengan sistem pengelolaan yang baik.

Menurut UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan kewenangan dalam pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan nasional adalah pemerintah pusat, sementara kewenangan dalam pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan propinsi adalah pemerintah propinsi. Ketika terjadi penurunan kondisi jalan untuk ruas jalan nasional dan ruas jalan propinsi membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikannya, apabila penanganan perbaikan dibiarkan dalam waktu yang lama otomatis tingkat kerusakan jalan semakin banyak, hal ini tentunya mengakibatkan kemacetan juga karena terjadinya penurunan kondisi jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 1 “Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Kota Sungai Penuh dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada jalan cangking) ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Kota Sungai Penuh dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada jalan cangking).

Tinjauan Pustaka

Perencanaan Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Suparmoko dalam Baihaqi (2011) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pembangunan Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Infrastruktur menurut Grigg (Nurmadimah, 2012:19) adalah “semua fasilitas fisik yang sering disebut dengan pekerjaan umum”. Menurut

AGCA (associated General Contractor of America), mendefinisikan infrastruktur adalah semua aset berumur panjang yang dimiliki oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah maupun pusat dan utilitas yang dimiliki oleh para pengusaha (Nurmadimah, 2012:20). Grigg (Nurmadimah, 2012:19) menjelaskan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan- bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2005, dijelaskan bahwa penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, sebab metode merupakan cara untuk mencapai tujuan. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2014)

Sedangkan menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realisasi social dan persepsi sasaran penelitian. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan di gambarkan sejak penelitian. Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan metodologi kualitatif itu sendiri.

Lokasi Penelitian

Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal obyektif dan reliabel tentang suatu hal / variabel tertentu (Sugiyono, 2015) Obyek penelitian pada penelitian kali ini ialah Badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Sungai Penuh.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015), jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa kualitatif

1. Data Kualitatif

Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat obyek penelitian.

2. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data primer di dapatkan secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yaitu informasi yang dilontarkan oleh para informan

3. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang berasal dari kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berupa keterangan keterangan serta laporan-laporan atau dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia

Manusia pelaksanaannya harus baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang mengatakan bahwa :

“aa khusus untuk jalan Cangking itu statusnya merupakan jalan Kota Sungai Penuh dan SK nya sudah ada dalam Perda atau Perwako untuk status jalan itu status jalan sungai penuh itu sudah penamaan fungsi atau statusnya itu sudah jalan kota Sungai Penuh kemudian untuk kewenangannya itu khusus untuk jalan kota Sungai Penuh itu ditangani oleh dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kota Sungai Penuh”

Manusia adalah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subjek atau pelakunya harus baik pula. Pengertian baik disini meliputi (a) Mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant*, dan sebagainya; (b) Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Sumber Daya Manusia, mempunyai pengaruh penting dalam pembangunan infrastruktur jalan Cangking di pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang infrastruktur sangatlah penting, mengingat infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kegiatan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas lingkungan. Namun disisi lain

kenyataan yang ada saat ini adalah masih belum cukupnya kualitas sdm yang menangani pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah Kota Sungai Penuh.

Keuangan

Keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang mengatakan bahwa :

“Menurut kito yo Efisien karena sesuai dengan peruntukannya karena jaringan jalan akses atau jalan lingkar kita belum ada jadi untuk akses untuk angkutan berat atau angkutan berat ya itu kita lewatkan disitu. Karena ya itu angkutan berat aa angkutan yang bebannya berat ya itu kita kontruksinya memakai RJP ton. Itu lah yang telah kita lakukan.”

Bapak Jeffer juga mengatakan bahwa :

“Terkait daerah perencanaan di sini kita perlu paham dulu nih BAPPEDA fungsinya seperti apa BAPPEDA berdasarkan tahun 2017 bahwa BAPPEDA merupakan intansi perencanaan pembagunan daerah jadi seluruh perencanaan koto ini di godoknya di BAPPEDA mulai dari dananya program kegiatannya jadi terkait dana itu di BAPPEDA sifatnya masiih indikatif di ambil dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJMD kota sungai penuh tahun 2001-2026 jadi RPJMD itu telah dibagi di tahun minsal 2021 besarnya segini 2022 segini 2023 segini terkait pembangunan jalan Cangking dan jalan lainnya itu nanti BAPPEDA bersama DAPD itu menghitung indikatif Rancangan berikut tahun berikutnya setelah mengeluarkan urusan wajib seperti mandang story mending dari pusat memang di hitung betul disamping itu untuk anggaran di SKPD dinilai juga dari kecapain program prioritas daerah dilaksanakan oleh SKPD tersebut terkait dengan apakah pembangunan jalan Cangking ini efektif dan tepat waktu itu lebih tepatnya di dinas yang terkait dinas PUPR “ Defisit atau Surplus di sampaikan oleh Bapak Jeffer :

“Sebenarnya kito Defisit anggaran jadi untuk mensiasati itu pemerintah kota Sungai Penuh berupaya untuk mencari sumber pendanaan lain. Khususnya dari dana Alokasi khusus (DAK) dari pusat jadi pembangunan yang sebelum ini atau yang bji beton itu dana dari anggaran dari alokasi khusus bantuan dari pusat”

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Munandar, beliau mengatakan bahwa: “Kendala kito cuman masalah pertama masalah ketersediaan anggaran, memang agak terbatas anggarannya karena sumber PAD kita sedikit sekali sehingga terkendala. Kedua ialah masalah teknis ini merupakan masalah teknis dilapangan itu misalnya masalah ketersediaan lahan, sudah kita rencanakan tapi lahannya belum tersedia itu juga berpengaruh itu dan juga kadang ada penolakan dari masyarakat. Itulah kendala yang kita hadapi.”

Kebijakan dalam mengatasi masalah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas BAPPEDA Kota Sungai Penuh :

“Kebijakan itu langsung di tangani oleh Pemerintah pusat melalui proses dana DAK dana alokasi khusus atau dana pusat jadi dananya kemudian kita kota Sungai Penuh diikut sertakan untuk melakukan pengawasannya”

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak bisa terlepas dari kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, keuangan merupakan faktor yang sangat penting, karena semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah membutuhkan dana/uang. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mempunyai tingkat kemampuan keuangan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam membiayai belanja daerah hendaknya penyumbang utama keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Peralatan

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu Pemerintah Daerah yang baik.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang mengatakan bahwa :

“untuk proses perencanaan kita memiliki RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan itu diturunkan melalui RPJMD (Rencana pembangunan jangka menengah daerah) ini berisikan program kegiatan dan visi misi walikota terpilih kemudian diturunkan lagi ke RKPD jangka tahunan dan proses nya itu sekrang telah kita mulai melalui proses Musrenbang desa kemudian kecamatan sudah dan Musrenbang Kota kemudian kita tetapkan RKPD sebentar lagi”

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Munandar, beliau mengatakan bahwa: “Kendala kito cuman masalah pertama masalah ketersediaan anggaran, memang agak terbatas anggarannya karena sumber PAD kita sedikit sekali sehingga terkendala. Kedua ialah masalah teknis ini merupakan masalah teknis dilapangan itu misalnya masalah ketersediaan lahan, sudah kita rencanakan tapi lahannya belum tersedia itu juga berpengaruh itu dan juga kadang ada penolakan dari masyarakat. Itulah kendala yang kita hadapi.”

Untuk masalah kualitas, Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mengatakan bahwa :

“secara kualitas memang sudah memenuhi standar nasional yak arena itu dari dana DAK jadi karena kondisi situ berawa jadi dan bebannya dilalui beban yang berat ya jadi secara kondisi memang agak turun ya disitu. Kalua standar kualitas infrastrukturnya sudah memenuhi itu tapi karena bawah nya berawa jadi cepat turun dia jalannya”

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peralatan merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan daerah untuk menjalankan pembangunan infrastruktur Jalan Cangking. Namun lemahnya peralatan sering terjadi karna, faktor lingkungan, faktor pendanaan, faktor sumber daya manusia, faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Fakta yang terjadi dilapangan, Lemahnya peralatan yang dimaksud adalah dari Sumber daya alam itu sendiri. Karena secara Geografis jalan Cangking ini merupakan tempat yang berawa. Ketersediaan lahan juga menjadi masalah bagi penerapan otonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh.

Organisasi dan Manajerial

Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang mengatakan bahwa :

“tentunya kita BAPPEDA merupakan badan koordinasi dan kita melakukan koordinasi dengan semua pihak terutama pemerintah kota Sungai Penuh sendiri dan pimpinan kita, bapak walikota dan DPR dan SKPD juga dengan desa seluruh dan elemen masyarakat

kemudian yang lebih penting lagi kita juga mencari sumber pendanaan lain selain dari dana pemerintah seperti dana CSR dari perusahaan dan yang jelas sekarang lagi ada dana CSR dari PLTA itu di Cangking itu ada beberapa ratus meter dilaksanakan oleh PLTA karena mereka kemaren itu akan lewat truk-truk batu itu kan jadi mereka melaksanakan kegiatan CSR di jalan Cangking”

Bapak Jeffer juga mengatakan bahwa :

“Untuk BAPPEDA sendiri telah melaksanakan fungsinya dengan maksimal sebagai mana di atur dengan perwaku dengan SKPD itu ada beberapa fungsi di mana saat ini ada 3 bidang yang sebelumnya 5 bidang jadi BAPPEDA saat ini ada bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi itu fokusnya terhadap perencanan di kota sengai penuh di tahun berikutnya kemudian ada bidang PSIK kemudian ada bidang PPN pemerintahan dan pemberdayaan manusia jadi di sini kami telah berbagi fungsi memiliki fungsi masing-masing seperti DPSIK lebih kepada Infrastruktur jadi di sini ada namanya bidang netra seperti PSIK membuahi beberapa dinas yang terkait dengan Infrastruktur seperti PUPR dinas perumahan pemukiman itu di bawa kendali PSIK kemudian bidang PPN terkait pembangunan manusia pemerintahan perbudayaan manusia seperti di dinas kesehatan dinas pendidikan itu di control oleh dibidang PPN jadi nanti dari bidang PPN DAN PSIK itu akan berkordinasi dengan PPE terkaita dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan ditahun berikutnya jadi menurut kami terkait fungsi di insyaallah kami telah melakukan secara optimal”

Pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui kebijakan otonomi masih dihadapkan pada beberapa kendala yang harus diatasi pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki kendala yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan dan kondisi rill daerah masing-masing. Beberapa kendala utama antara lain (Bastian, 2006 : 343):

1. Belum memadai dan belum mantapnya kelembagaan di daerah, sehingga cenderung dapat menghambat pelaksanaan dan desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Masih terbatasnya ketersediaan dana pembangunan, sementara tuntutan untuk mempercepat pembangunan semakin gencar.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana asar di beberapa daerah.
4. Tidak meratanya ketersediaan sumber daya alam di beberapa daerah.
5. Kurang dan tidak meratanya SDM yang berkualitas. Padahal, SDM berkualitas dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan tumbuhnya reativitas di daerah.
6. Kendala alamiah, yaitu sumber daya alam daerah yang tidak sama.
7. Kendala institusional.
8. Kendala investasi (modal).
9. Kendala sumber keuangan daerah dalam APBD.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang mengatakan bahwa :

“jadi kita melalui otonomi daerah diberikan kewenangan melakukan pembangunan langsung di daerah melalui proses dan tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat dan kita mulai melalui dinas pekerjaan umum setiap tahunnya akan melakukan survey dan pemantauan mengenai kualitas jalan. Mana jalan yang kualitasnya jelek nah itu sudah ada data nya dan akan tiap tahunnya sudah dilakukan survey. Secara umum tentunya kita akan memprioritaskan jalan yang kondisinya sudah jelek dan khususnya jalan cangking karena kondisinya masih bagus tentunya tidak di prioritaskan”

“Manfaat Sungai Penuh ya target kita untuk pembangunan infrastruktur tentunya untuk menopang atau menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Sungai Penuh secara umumnya”

Bapak Munandar menjelaskan tentang masalah yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan dan target, beliau mengatakan bahwa :

“Kendala kito cuman masalah pertama masalah ketersediaan anggaran, memang agak terbatas anggarannya karena sumber PAD kita sedikit sekali sehingga terkendala. Kedua ialah masalah teknis ini merupakan masalah teknis dilapangan itu misalnya masalah ketersediaan lahan, sudah kita rencanakan tapi lahannya belum tersedia itu juga berpengaruh itu dan juga kadang ada penolakan dari masyarakat. Itulah kendala yang kita hadapi.”

Bapak Jeffer juga mengatakan bahwa :

“Jadi memang dalam perencanaan ada indicator ada pencapaian dan target jadi memang kebijakan-kebijakan yang di ambil itu seperti yang kami sampaikan tadi kami menilai dari capaian dan kinerja SKPDnya minalkan di SKPD A itu capainya terhadap program prioritasnya sudah 80% tentu ada SKPD yang capainya masih rendah minalkan kita ambil contoh 40% tentu otonomi daerah yang di maksud di sini kebijakan yang di ambil untuk perencanaan SKPD antara pencapaian yang tinggi untuk anggaran SKPD tidak prioritas lagi sedangkan pencapaiannya masih rendah itu yang jadi prioritas kami di BAPPEDA untuk anggaran SKPD kemudian seperti itu jawaban dari kami”

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktor Organisasi/Manajerial penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Cangking di kota Sungai Penuh diperlukan pengawasan, perencanaan dan lain sebagainya untuk mencapai, tujuan dan target pembangunan Infrastruktur yang efektif dan efisien. Untuk menciptakan suatu Pemerintahan Daerah yang baik dan yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor Organisasi dan manajerial ini mutlak diperlukan. Tidak tercapainya target dan sasaran dalam pembangunan infrastruktur ini tentunya memerlukan evaluasi dan sinergi semua pihak dalam menentukan arah pelaksanaan kedepannya.

IV. KESIMPULAN

Sumber Daya Manusia, mempunyai pengaruh penting dalam pembangunan infrastruktur jalan Cangking di pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang infrastruktur sangatlah penting, mengingat infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kegiatan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas lingkungan. Namun disisi lain kenyataan yang ada saat ini adalah masih belum cukupnya kualitas sdm yang menangani pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah Kota Sungai Penuh.

Lemahnya Keuangan, Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan daerah untuk menjalankan pembangunan infrastruktur di Kota Sungai Penuh. Namun lemahnya Keuangan sering terjadi karna kurangnya perencanaan dan kurang efektif dan efisien pelaksanaan dalam pembangunan Infrastruktur di Jalan Cangking. Faktanya, Pembangunan Infrastruktur jalan Cangking ini mengalami Defisit Anggaran dan menggunakan dana Alokasi khusus DAK dan mencari dana ke pihak ketiga atau Lembaga-lembaga lain di Kota Sungai Penuh. Pemerintahan Kota Sungai Penuh belum cukup efisien dalam pembangunan infrastruktur jalan Cangking di Kota Sungai Penuh. Karna ada di

beberapa jalan di daerah Kota Sungai Penuh masih ada yang rusak dan mengalami penurunan, penyebabnya terjadi karna lemahnya sumberdaya manusia, Faktor alam, factor Geografis atau bisa jadi materialnya yang kurang bagus.

Lemahnya peralatan sering terjadi karna, faktor lingkungan, faktor pendanaan, faktor sumber daya manusia, faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Fakta yang terjadi dilapangan, Lemahnya peralatan yang dimaksud adalah dari Sumber daya alam itu sendiri. Karena secara Geografis jalan Cangking ini merupakan tempat yang berawa juga dalam pelaksanaannya melebihi waktu yang ditentukan dan peralatan yang kurang efektif.

Faktor Organisasi/Manajerial penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Cangking di kota Sungai Penuh diperlukan pengawasan, perencanaan (RPJP dan RPJMD) dan lain sebagainya untuk mencapai, tujuan dan target pembangunan Infrastruktur yang efektif dan efisien. Fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Jalan Cangking adanya pelaksanaan yang melebihi waktu atau target, Defisit anggaran dan juga factor sumber daya manusia.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk publis jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN). serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, Mulia. 2009. *Penelitiannya Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD Dan Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Kota Pemerintah Aceh*. Universitas Syah Kuala Banda Aceh.
- Baihaqi. 2011. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*. Jurnal Akuntansi.
- Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Surabaya.
- Cora. M. Tang. 2012. *Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Naional Akuntansi X, UNHAS Makassar.
- Grigg, N. 1988, *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons.
- Herlinda. 2019. *Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dikotas Sungai Penuh Tahun 2019*.
- Jaya, I Putu N.P.K, Dwirandra, A.A.N.B. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi*. e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92.
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.